

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang dibekali dengan akal agar menjadi landasan untuk berfikir dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan menjadi cara agar manusia mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga hal itu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Terlihat dari kualitas sumber daya manusia berdasarkan data Human Development Index tahun 2015 (bps.go.id) Negara Indonesia telah mencapai 69,55 yang meningkat 0,65 poin dibandingkan Human Development Index tahun 2014 sebesar 68,90. Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Poin tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu 0,65 antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Tetapi peningkatan ini belum mencapai poin maksimal jika dibandingkan dengan beberapa Negara yang ada di dunia. Sehingga kualitas sumber daya manusia harus dioptimalkan melalui salah satu aspek yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikannya kurang dari harapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 mengenai wajib belajar pada pasal 1 ayat 1 yaitu “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah”. Kemudian pada ayat 2 yaitu “pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”. Kedua pasal tersebut jelas menegaskan peraturan wajib belajar 9 tahun untuk seluruh warga Negara Indonesia. Tetapi pada kenyataannya hanya menurut data masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendidikan kurang dari wajib belajar 9 tahun. Data pada (bps.go.id) mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) pada

tahun 2015 yaitu 99,09 yang berusia 7-12 tahun, dan 94,88 yang berusia 13-15 tahun. Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia belum mencapai batas maksimal dengan adanya data persentase yang menunjukkan tidak sekolah lagi (bps.go.id) 0,17 yang berusia 7-12 tahun dan 4,48 yang berusia 13-15 tahun. Adanya jumlah warga Negara Indonesia yang tidak sekolah lagi dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya ekonomi.

Tingginya biaya untuk bersekolah di jalur pendidikan formal terkadang menjadi sebuah alasan yang digunakan ketika anak tidak sekolah. Padahal pada kenyataannya biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun itu tanpa biaya, hanya saja keperluan pribadi misalnya seragam sekolah, buku tulis dan yang lainnya menjadi tanggungan pribadi.

Negara Indonesia memiliki beberapa pilihan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun. Ada tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Jalur pendidikan ini memiliki sistem yang berbeda, setiap jalurnya memiliki ciri. Umumnya masyarakat Indonesia hanya mengetahui jalur pendidikan formal yang dilaksanakan di ruang kelas dan pendidik sebagai sumber belajar. Kurikulum yang digunakannya pun sudah ditentukan untuk setiap tingkat di jenjangnya, dan mengharuskan semua peserta didik menyelesaikan secara bersamaan. Pada kenyataannya kebutuhan dan tingkat pemahaman dari setiap peserta didik berbeda-beda. Sehingga adanya keselarasan pada setiap kompetensi yang harus di capai oleh setiap peserta didik harus ada karena pendidikan formal mengacu kurikulum yang telah ditentukan.

Tetapi pada saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka dan ada beberapa yang memilih untuk berpendidikan nonformal. Dimana pendidikan nonformal berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat dan tidak selalu mengharuskan untuk mempelajari mata pelajaran yang ada di kurikulum. Maksudnya yaitu adanya penambahan kemampuan yang harus dimiliki oleh warga belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu pendidikan nonformal bersifat fleksibel pada hal waktu pelaksanaan, pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara tutor dengan warga belajar tanpa mengganggu

kesibukannya. Warga belajar pendidikan nonformal tidak hanya bagi anak-anak dan remaja, tetapi orang dewasa pun dapat mengikuti pendidikan ini.

Pendidikan di Indonesia memiliki tiga jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga angka HDI Indonesia dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Kualitas pendidikan dapat membentuk masyarakat memiliki kecerdasan dan kemandirian sebagai investasi proses pembangunan dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tetapi pembangunan disini merupakan pengembangan dari pendidikan, sehingga akan memperoleh hasil kualitas pendidikan yang baik. Indikator pembangunan dengan membuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat berpartisipasi khususnya dalam bidang pendidikan.

Kota Banjar salah satu kota yang memiliki lembaga pemerintahan bergerak dalam bidang nonformal yaitu Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Kegiatan Belajar atau yang sering dikenal dengan SKB di Kota Banjar sudah memiliki beberapa program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya yaitu Kursus Wirausaha Desa (KWD). Keberhasilan program serta pasrtisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Kursus Wirausaha Desa yang berjalan di SKB Kota Banjar .

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan yaitu dengan keikutsertaan memberikan gagasan, dukungan dan kritik membangun. Masyarakat sebagai kontroler dalam pendidikan agar dalam pelaksanaannya dapat terjalin kerjasama yang baik antara keduanya. Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh ketika masyarakat memperoleh manfaat berupa pengakuan dari lembaga pendidikan karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan lembaga.

Lembaga pendidikan disini merupakan bagian dari ketiga jalur pendidikan di Indonesia. Seluruh jalur pendidikan mampu memunculkan pasrtisipasi masyarakat karena terselenggaranya pendidikan yang baik yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak salah satunya masyarakat di lingkungan sekitar. Adapun jenis partisipasi masyarakat yang dapat disumbangkan menurut Wiranto (2016, hlm.29)

antara lain: (a) partisipasi material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi; (b) partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan; (c) partisipasi tenaga/fisikal bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu pendidikan; dan (d) partisipasi moral dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat. Berbagai partisipasi yang diberikan masyarakat akan berdampak besar terhadap pelaksanaan pendidikan.

Keterbatasan dan kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk memperoleh keahlian sesuai kebutuhan dan minat menuntut upaya-upaya untuk mewujudkan potensi masyarakat bagi pembangunan bangsa. Pendidikan nonformal berusaha memecahkan permasalahan tersebut agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam keberlangsungan pendidikan tetapi aktif juga dalam proses pelaksanaan pendidikan. Di sisi lain masyarakat akan merasakan kebermaknaan dari program-program yang disajikan, karena pendidikan nonformal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dilaksanakan pada tahap perencanaan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan nonformal. Masyarakat terutama di sekitar lembaga pendidikan nonformal diharapkan dapat ikutsertaberpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program.

Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya yaitu Kursus Wirausaha Desa yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjar. Pendidikan Nonformal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 mengenai kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut program Kursus Wirausaha Desa merupakan program yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi terkait dengan pekerjaannya sehari-hari. Pengembangan potensi masyarakat agar menjadi mandiri dan sikap yang professional.

Program Kursus Wirausaha Desa yang pada umumnya memiliki warga belajar masyarakat usia dewasa serta pelaksanaan pembelajaran yang sederhana, mudah diimplementasikan serta dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan belajar masyarakat akan tercapainya efektivitas belajar.

Pendidikan Luar Sekolah memiliki berbagai macam pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Kursus Wirausaha Desa pun menjadi bagian dari program Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia. Penerapan program Kursus Wirausaha Desa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat untuk lingkup Desa. Negara Republik Indonesia memiliki latar belakang menerapkan program Kursus Wirausaha Desa yaitu berdasarkan pengalaman Negara maju seperti Amerika Serikat bahwa Kursus Kewirausahaan Desa memiliki implikasi yang baik bagi kehidupan (Tim BBE Depdiknas, 2003, hlm.1).

Oleh sebab itu keberhasilan sebuah program Pendidikan Nonformal dapat terlihat dari partisipasi masyarakat sekitar lembaga. Sehingga penulis tertarik mengambil penelitian pada SKB Kota Banjar dengan judul **“PARTISIPASI PESERTA KURSUS WIRAUSAHA DESA (KWD) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN USAHA DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BANJAR”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KWD di SKB Kota Banjar terlihat dengan banyak yang mengikuti berjumlah 10 orang.
2. Keinginan masyarakat untuk mengembangkan diri berwirausaha.
3. Minat belajar masyarakat yang tinggi dengan motivasi dalam diri.
4. Keberhasilan program SKB Kota Banjar terlihat dari adanya output yang dihasilkan yaitu salah satunya menghasilkan kelompok perikanan darat gurame di kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang merupakan program dari KWD.
5. Dukungan modal yang masih belum memadai untuk pengembangan program.

6. Pembekalan dan pembinaan yang diberikan oleh pihak SKB Kota Banjar yang cukup diberikan kepada warga belajar program Kursus Wirausaha Desa.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan pembatasan masalah yaitu mengenai partisipasi peserta Kursus Wirausaha Desa (KWD) dalam meningkatkan kemandirian usaha di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjar. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung terhadap keberhasilan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan diselesaikan dalam permasalahan ini yaitu :

1. Menjelaskan gambaran pelaksanaan Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar;
2. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar;
3. Memaparkan faktor-faktor yang mendukung terhadap keberhasilan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) di SKB Kota Banjar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang didasarkan pada sebuah objek permasalahan diharapkan dapat menyelaraskan antara hasil dilapangan dengan teori yang sudah ada. Selain itu dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- 1) Lembaga : dapat melanjutkan dan lebih meningkatkan keberhasilan setiap program yang ada khususnya KWD;
- 2) Warga belajar : dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pelaksanaan program yang disediakan oleh SKB Kota Banjar;
- 3) Peneliti : dapat lebih menambah wawasan mengenai program yang diselenggarakan dengan kerjasama lembaga dan masyarakat untuk dijadikan bekal dalam melaksanakan program pada waktu yang akan datang.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapula sistematika dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada peraturan Rektor UPI Nomor 6411/UN40/HK/2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 sebagai berikut:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang menjadi landasan dan acuan dalam analisis pembahasan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang dimuat dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi masyarakat, dan konsep kursus.

1.5.3 Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti mencakup metode dan pendekatan.

1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.